



Ekonomi Perang Jepang di Palembang, 1942-1945

Andromeda Aderoben¹, Ira Septiansi², Syarifuddin^{3*}

¹ Universitas Sriwijaya; andromeda.aderoben21@gmail.com

² Universitas Sriwijaya; iraseptiansi@gmail.com

³ Universitas Sriwijaya; syarifuddin@fkip.unsri.ac.id

* Korespondensi

Dikirim: 28-10-2021; Diterima: 24-05-2022; Diterbitkan: 25-06-2022

Abstract: The essence in this writing is the treasury in the preservation of Palembang's local history that is minimal in the literature of the Japanese occupation. Studies in the field of the local economy in Palembang during the Japanese occupation are still few, for the existence of this writing can be a part of the wealth of local history. The main point of this research is the economy as a supporter of Japan's military war, not focusing on the economy of local communities. This paper uses historical research methods, namely heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. Palembang's rich mineral resource potential became a supporter of the Great East Asian War by Japan in 1942-1945. This paper presents images and tables as simplifications in reconstruction results.

Keywords: crude oil; economics of war; histories of Palembang; Japan occupation

Abstrak: Intisari dari penulisan ini adalah khazanah pelestarian sejarah lokal Palembang yang minim dalam literatur pendudukan Jepang. Kajian di bidang ekonomi lokal di Palembang pada masa pendudukan Jepang masih sedikit, agar keberadaan tulisan ini dapat menjadi bagian dari kekayaan sejarah lokal. Pokok dari penelitian ini adalah ekonomi sebagai pendukung perang militer Jepang, tidak terfokus pada ekonomi masyarakat lokal. Tulisan ini menggunakan metode penelitian sejarah, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Potensi sumber daya mineral Palembang yang kaya menjadi pendukung Perang Asia Timur Raya oleh Jepang pada tahun 1942-1945. Makalah ini menyajikan gambar dan tabel sebagai penyederhanaan dalam hasil rekonstruksi.

Kata Kunci: ekonomi perang; minyak mentah; sejarah Palembang; pendudukan Jepang



Jurnal Fajar Historia is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Pendahuluan

Ekonomi perang Jepang dimulai dari “*Marco Polo Bridge Incident*” atau Insiden Jembatan Marco Polo pada tahun 1937 (Hara, 1998, p. 224). Dalam dekade ini juga pecahnya Perang Asia Timur Raya menjadi babak baru bagi sejarah dunia sehingga secara tidak langsung Indonesia terkena dampak dari para “aktor” yang terlibat. Jepang menjadi tokoh utama dalam periode perang tersebut melibatkan kota Palembang sebagai rencana atau target perangnya. Tentu merebut Palembang bukanlah kemenangan mutlak pada Perang Asia Timur, tetapi menguasai Palembang dapat membantu perekonomian militer Jepang sebagai penyokong selama masa atau pasca perang.

Tujuan utama Jepang di Asia Tenggara adalah Hindia Belanda karena kekayaan pertanian tropis, bahan baku mineral dan pasokan tenaga kerja potensial berada di negeri itu (Pelzer, 1942). Menyerang wilayah selatan (termasuk Palembang) adalah ambisi Jepang untuk membangun “*The Greater East Asia Co-Prosperity Sphere*”. Sikap ultranasionalis serta ambisi menjadi super ekonomi dunia, tekanan perekonomian di dalam negeri sendiri dan pengalaman imperium di sebagian wilayah Asia (Manchuria-Indocina) hingga “*Marco Polo Bridge Incident*” dirasa sudah cukup untuk menyelesaikan permasalahan super ekonomi dunia dengan invasi ke Palembang.

Palembang memiliki kedudukan khusus dalam strategi militer Jepang karena Palembang kaya akan minyak mentah dan Jepang butuh itu untuk angkatan perangnya (Hanafiah, 1998, p. 105). Daerah Palembang dan sekitarnya merupakan wilayah yang kaya akan ladang minyak se-Sumatera yakni kilang minyak BPM (*Bataafse Petroleum Maatschappij*) di Plaju dan NKPM (*Nederlandse Koloniale Petroleum Maatschappij*) di Sungai Gerong yang dimana kedua perusahaan ini memasok minyak penerbangan beroktan tinggi dan penyuplai sebagian besar angkatan udara di Pasifik (Nortier, 1985). Selain karena sumber daya alam yang melimpah, Jepang mengadakan program pengerahan tenaga kerja massal yang dikenal tenaga kuli *romusha* atau Badan Pembantu Pemerintah (BPP) untuk wilayah Palembang (Zed, 2003, p. 248). Disisi lain, kepentingan akan memenangi Perang Asia Timur Raya ini Jepang membutuhkan sekitar 7,9 ton minyak (Jong, 1969a, p. 695). Dengan latar belakang menjadi bukti konkret bahwa Jepang akan memanfaatkan penuh perekonomian Palembang pada tahun 1942-1945 sebagai pendukung dan penyokong kekuatan perang.

Fenomena ultranasionalis dan “kamikaze” sudah dipastikan *Dai Nippon Teikoku* (Kekaisaran Jepang) siap menerima resiko akan melawan pemerintahan Hindia Belanda yang terlebih dahulu menguasai kota Palembang. Langkah Jepang sebelum menaklukkan kota Palembang adalah menyerang penghasil minyak pertama di Hindia Belanda dimulai di Kota Tarakan pada 11 Januari 1942, menyebar ke Balikpapan yang merupakan sumber minyak kedua pada 29 Januari 1942 (Poesponegoro & Notosusanto, 1992, p. 1). Setelah Kalimantan, Jepang melancarkan serangan di Sumatera bagian selatan.

Dini hari Sabtu tanggal 12 Februari 1942 Jepang mulai menyerbu Palembang bersamaan dengan serangan di Singapura, bahkan dua hari kemudian pada 14 Februari 1942 ratusan pasukan payung dan berhasil menguasai Palembang dalam waktu singkat (Zed, 2003, p. 229). Walaupun sebetulnya dalam rencana invasi ke Palembang, Jepang menargetkan serangan pada tanggal 1-6 Februari 1942 (Remmelink, 2018, p. 101).

Berawal dari permasalahan di atas mencuat pertanyaan yang menjadi fokus bagi penulis dalam penelitian ini yakni sebagai berikut. Bagaimana konsep ekonomi perang dan bagaimana praktik ekonomi perang Jepang di Palembang? Untuk memperkuat rumusan masalah dalam tulisan ini perlu tinjauan pustaka yang relevan dan spesifik dengan pendekatan ekonomi.

Tulisan dengan sudut pandang ekonomi perang (menurut Jonathan Goodhand) dalam imperium perang Jepang bukan sesuatu hal yang baru. Pertama-tama, secara spesifik topik ekonomi perang Jepang di Palembang ditulis oleh Zed (2003). Selain Mestika Zed, tulisan

Tanjung (2015) juga terdapat substansial khusus mengenai perekonomian minyak di Plaju dan Sungai Gerong yang merupakan bagian dari Kota Palembang sebagai markas besar Jepang. Dalam segi komoditi lain, penulis merinci komoditi lain sebagai pendukung ekonomi perang Jepang yakni sumber daya manusia dengan melatih masyarakat untuk dipekerjakan dalam industri perminyakan dari rentang waktu 1942 hingga 1945.

Sekalipun buku atau artikel yang disebutkan ini telah sedikit membahas mengenai apa yang akan menjadi fokus atau topik persoalan dalam artikel ini, perlu disampaikan bahwa belum ada pembahasan yang cukup menyeluruh dari pendudukan Jepang di Palembang dilihat dari sektor perekonomian yang sangat membantu membangun strategi perang Jepang. Praktik dari imperium ekonomi perang Jepang di Palembang pada tahun 1942-1945 ini perlu dianalisis lebih dalam. Atas dasar itulah kemudian artikel berkaitan dengan tema ini menjadi penting untuk diangkat dalam khazanah penulisan sejarah Indonesia.

Metode Penelitian

Metode sejarah diartikan sebagai “seperangkat prinsip dan aturan yang sistematis yang dimaksudkan untuk membantu dalam pengumpulan sumber-sumber sejarah, menilainya secara kritis, dan menyajikan suatu sintesis (umumnya dalam bentuk tertulis) hasil yang dicapai (Herlina, 2020, pp. 1-2). Terdapat empat tahapan menggunakan metode sejarah yang digunakan dalam tulisan ini, yaitu heuristik, kritik sumber, analisis sintesis (interpretasi), dan penulisan (Kartodirdjo, 1992, p. 2).

Tahap pertama yaitu heuristik. Heuristik adalah teknik atau cara-cara untuk menemukan sumber yang bisa didapat melalui studi kepustakaan. Sumber yang digunakan untuk tulisan ini adalah sumber tertulis. Sumber-sumber tertulis tersebut meliputi buku, artikel dan laporan. Tahap kedua adalah kritik sumber, yaitu tahapan/kegiatan meneliti sumber, informasi, jejak tersebut secara kritis, yang terdiri atas kritik eksternal dan kritik internal (Herlina, 2020, p. 30) Kritik ekstern adalah penentuan asli atau tidaknya suatu sumber atau dokumen (Yass, 2004, p. 35). Setelah di tentukan keaslian sumber atau dokumen tersebut dilakukan Kritik intern yaitu untuk menentukan layak atau tidaknya data tersebut sebagai sumber yang valid. Terdapat kritik sumber dalam tulisan ini yaitu kuantitas (menunjukkan angka) dalam komoditas produksi minyak dan komoditi lain (perkebunan dan tenaga kerja) sehingga penulis secara bijak dalam kritik sumber ini sehingga tulisan ini.

Tahap ketiga adalah analisis sintesis (interpretasi) adalah fakta yang diperoleh, dari sumber tertulis dianalisis dengan menggunakan analisis prosesual dan struktural (Sufyan, 2021). Analisis prosesual digunakan untuk menemukan cara jepang merebut ekonomi di Palembang serta dampak perekonomian ini bagi Jepang. Adapun analisis struktural digunakan untuk menganalisis bagaimana proses pengendalian ekonomi perang Jepang. Tahap keempat, historiografi yaitu tahapan/kegiatan menyampaikan hasil-hasil rekonstruksi imajinatif masa lampau itu sesuai dengan jejak-jejaknya dengan kata lain tahapan kegiatan penulisan.

Hasil Penelitian

Konsep Ekonomi Perang Secara Umum

Istilah "ekonomi perang" atau "ekonomi tempur (*combat economy*)" biasanya digunakan untuk mencakup semua kegiatan ekonomi legal atau ilegal yang dilakukan sebelum dan masa perang. Istilah ekonomi perang tersebut secara lebih sempit untuk membedakannya dari jenis ekonomi lain yang muncul dalam kondisi masa perang. Ekonomi perang merupakan bagian dari jenis ekonomi yang telah diidentifikasi oleh Goodhand (2004). Goodhand mengidentifikasi perbedaan jenis ekonomi menjadi tiga yaitu *combat war* (ekonomi perang), *shadow economy* (ekonomi bayangan), dan *coping economy* (penanggulangan ekonomi). Tiga jenis itu ekonomi tersebut memungkinkan berbagai kelompok untuk berperang, mendapat untung, penanggulangan atau bertahan hidup. Masing-masing dari ketiga jenis ekonomi tersebut memiliki dinamika dan pola perubahannya sendiri.

Ekonomi perang mencakup produksi, mobilisasi dan alokasi sumber daya ekonomi untuk mempertahankan konflik dan strategi ekonomi perang yang ditujukan untuk melemahkan kelompok tertentu secara sengaja. Prioritas konsep ekonomi perang adalah melibatkan pembangkitan sumber daya untuk berperang atau melibatkan penghancuran sumber daya untuk melemahkan kemampuan kelompok lawan untuk berperang (Goodhand, 2003).

Ekonomi perang dapat diartikan sebagai strategi dan proses dimana negara mengkonsolidasikan atau memperkuat posisi mereka di dalam negeri dalam sistem negara internasional di luar batas-batas nasional (Goodhand, 2004). Studdard (2004) menganalisis buku karya Pugh, Cooper, Pugh, dan Goodhand (2004) yang berjudul *War Economies in a Regional Context: The Challenges of Transformation* bahwa ekonomi perang berkaitan dengan permulaan perang atau pemeliharaan konflik, tidak memedulikan dampak atau efek yang ditimbulkan terhadap transformasi pasca-konflik atau setelah perang.

Praktik ekonomi perang ini dimana pihak yang berperang dapat melanggengkan konflik sebagai cara yang disengaja untuk mengamankan keuntungan ekonomi dan kekuatan politik (Billon *et al.*, 2000:6). Untuk melakukan pemeliharaan konflik tersebut, mereka (para aktor perang) membutuhkan sumber daya yang dihasilkan (perdagangan komoditas) oleh ekonomi perang. Pada gilirannya, ekonomi perang akan menentukan sampai batas tertentu dampak perang terhadap penduduk lokal dan bahkan terhadap jalannya konflik.

Dalam pengertian ini, ekonomi perang tidak hanya mengacu pada keadaan ekonomi pada saat konflik, tetapi didefinisikan sebagai hubungan dan transaksi ekonomi yang menyebabkan, mempertahankan atau memperpanjang periode kekerasan politik fisik atau kejadian di mana aktor mengambil keuntungan dari kekerasan politik untuk keuntungan finansial (Peterson, 2014, p. 4). Billon., *et al.* (2000, pp. 6-9) mengungkapkan bahwa terdapat 5 bentuk ekonomi perang yaitu.

1. Ekonomi perang negara: diselenggarakan oleh kelompok politik terstruktur (kebanyakan negara) melalui kuasi perpajakan hukum atas pendapatan/keuntungan serta pinjaman domestik dan asing. Namun, efektivitasnya dapat mengakibatkan perang skala industri yang

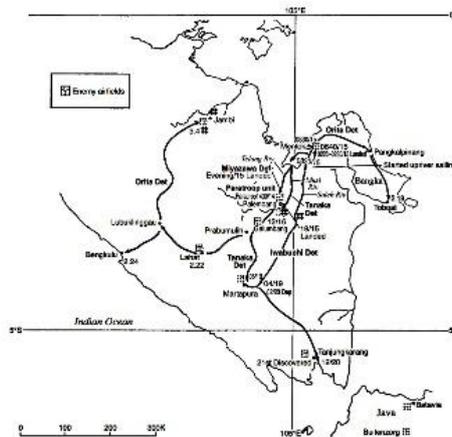
- jika mereka menargetkan warga sipil, dapat memiliki efek yang menghancurkan pada populasi (misalnya, Peristiwa Holocaust Yahudi; pemboman Dresden; Hiroshima).
2. Ekonomi perang gerilya: kelompok-kelompok bersenjata besar yang hanya dapat mengandalkan sumber daya lokal karena harus mengembangkan hubungan dekat dengan penduduk lokal melalui persuasi politik (misalnya, *The Liberation Tigers of Tamil Eelam* di Sri Lanka).
 3. Ekonomi perang komersial: komersialisasi sumber daya lokal (misalnya, permata; kayu) atau perdagangan barang-barang terlarang (misalnya, narkoba) telah menjadi dasar dari banyak ekonomi perang kontemporer. Dampaknya bahkan bisa positif dengan berkontribusi pada pembukaan ekonomi atau perlindungan sektor ilegal. Namun, sebagian besar ekonomi perang komersial baik menjadi ekonomi enklave yang membatasi pengembangan sektor lain dan partisipasi warga sipil (misalnya, sektor minyak dan berlian di Angola), atau mengeksploitasi mereka (misalnya, kerja paksa di perkebunan karet di Liberia).
 4. Ekonomi perang predator: kelompok-kelompok bersenjata yang berhubungan dengan populasi lokal dan sumber daya ekonomi melalui kekerasan, predasi, dan kerja paksa (misalnya, pasca-Renamo pasca-1983 di Mozambik).
 5. Ekonomi perang aliansi asing: kelompok-kelompok bersenjata mendirikan tempat perlindungan militer di dalam negara-negara tetangga di sepanjang batas-batas nasional untuk mendapatkan perlindungan asing dan dukungan ekonomi/logistik (misalnya, Contras di Honduras; Aliansi Pasukan Demokratik untuk Kebebasan, atau AFDL, di DR Kongo).
 6. Ekonomi perang kemanusiaan: perlindungan dan sumber daya internasional yang diberikan kepada penduduk sipil sebagai pengungsi internasional atau di dalam 'tempat berlindung yang aman' menyediakan 'tempat perlindungan kemanusiaan' bagi kelompok-kelompok bersenjata (misalnya, Khmer Merah di Thailand; Mujahidin Afghanistan di Pakistan).

Secara khusus, ekonomi perang yang dilakukan oleh Jepang bukanlah hal baru dalam politik internasional. Dalam penelitian ini konteks ekonomi perang secara eksplisit masuk dalam beberapa kategori di atas yaitu ekonomi perang gerilya, predator, dan komersial. Militer Jepang terbukti telah melakukan strategi ekonomi perang di kota Palembang yaitu sumber daya lokal berupa minyak mentah dan tenaga kerja.

Invasi Jepang di Palembang

Dai Nippon Teikoku mengerahkan pasukan udaranyanya pada tanggal 12 Februari 1942 bersamaan dengan serangannya ke Singapura yang diiringi dengan tiga pesawat pengintai Jepang yang bermanuver di atas kilang minyak Plaju dan Sungai Gerong (Zed, 2003, p. 229). Bahkan sebelum Singapura sendiri jatuh, Palembang sudah diserang oleh militan Jepang (Heurn, 1945, p. 53) Tiga pesawat Jepang berada pada ketinggian sekitar 400-600 kaki dan sempat menembakkan beberapa tembakan mortir kemudian pergi menghindari serangan balasan dari bawah (Hanafiah *et al.*, 2001, p. 16). Dari langkah pertama Jepang ini mengindikasikan bahwa kilang minyak merupakan hal pertama yang harus ditaklukan, bukan perangkat vital seperti gedung pemerintahan atau markas militer Hindia Belanda di Palembang.

Kota Palembang masuk dalam cetak biru Jepang dengan kode operasional “L” (Lohnstein, 2021, p. 28; Remmelink, 2018, ppp. 208&258). Palembang menjadi sasaran utama Jepang karena setengah dari produksi minyak di Hindia Belanda mengalir melalui kota itu (Tanjung, 2015). Posisi Palembang juga dipandang penting oleh Jepang karena memiliki sumber daya alam lain seperti batu bara, timah, karet, kelapa sawit, dan sebagainya, bagi keperluan perang (Abubakar *et al.*, 2020, p. 111).



Gambar 1. Garis besar operasi unit Pasukan Jepang Angkatan Darat Divisi 38
Sumber: Remmelink, 2018, p. 304

Serangan Jepang di Palembang ini pun sudah diprediksi oleh pemerintah pusat Hindia Belanda di Jawa. Sebelum *Dai Nippon* tiba, Pemerintah Hindia Belanda di Batavia menginstruksikan pasukannya di Palembang untuk membumihangsukan kilang minyak dan melepaskan 10.000 ton minyak ke Sungai Musi untuk membakar konvoi militer Jepang yang datang dari Sungai Musi (Vries, 2018). Dari dua instalasi minyak di Palembang, hanya Plaju yang relatif utuh sedangkan kilang minyak Sungai Gerong hancur berantakan (Hanafiah *et al.*, 2001, p. 27). Strategi bumihangus Belanda ini keliru yang berfikir bahwa Jepang menyerang Palembang seperti strategi menyerbu kilang minyak di Tarakan dan Balikpapan dengan jalur laut dan darat (Abubakar *et al.*, 2020, p. 111). Padahal penyerbuan militer Jepang di Palembang yang dilancarkan oleh Divisi ke-38 ini melalui jalur udara, darat dan laut (Selat Bangka- Sungai Musi).



Gambar 2. Pasukan parasut Jepang di langit Palembang
Sumber: Lohnstein, 2021, p. 58

Taktik “Blitzkrieg” atau “serangan kilat” Jepang dilancarkan pada tanggal 14 Februari 1942 melalui serangan udara dengan meluncurkan Pasukan Parasut masuk dan menduduki kota Palembang (Plaju, 1999, p. 5). Sekitar 700 penerjun payung Jepang diturunkan di dan dekat bandar udara Palembang dan kilang minyak (Nortier, 1985). Pengiriman pasukan parasut dalam dua gelombang. Setiap gelombang diturunkan sebanyak 350 pasukan dari ketinggian 600 kaki (Division, 1945, p. 25). Pun rujukan Tanjung (2015) mengatakan terdapat 600 pasukan payung mendarat di salah satu lapangan terbang dan dua kompleks kilang minyak Plaju, pertahanan Sekutu tidak bisa membendung laju musuh. Masih dalam strategi bumi hangusnya, Belanda menyalakan pabrik, penyulingan minyak tersebut serta ratusan rumah, gudang, kantor, bengkel, hingga jaringan pipa ke lokasi pengeboran dan sumur itu sendiri juga hancur dalam kobaran api (Heurn, 1945, p. 55). Sedangkan disisi pertahanan KNIL Belanda di Palembang sendiri dalam keadaan tidak siap menghadapi serangan Jepang (Hanafiah *et al.*, 2001, p. 18).

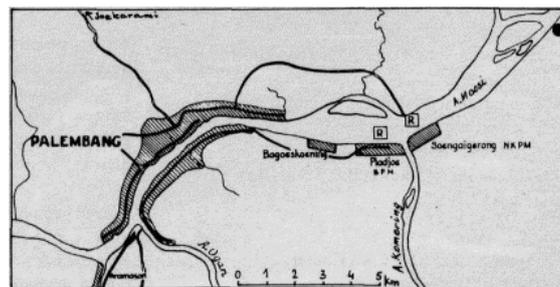


Gambar 3. Kilang minyak Sungai Gerong yang penuh dengan gumpalan asap akibat strategi bumihangus Sekutu
Sumber: beelbankwo2.com, 2021

Sekalipun sumber-sumber sebelumnya menyatakan Sekutu sangat terdesak, terdapat satu informasi penting yang tidak dikutip oleh mereka adalah sebetulnya Jepang tidak benar-benar lancar dalam menjalankan operasi “L” ini. Perlawanan dari ABDACOM dan KNIL dengan basis pertahanan antipesawat berhasil menembak jatuh enam belas pesawat Jepang sehingga

secara pasukan *Nippon* pun ikut terdesak dan Sekutu dapat mengendalikan situasi untuk sementara (Division, 1945, p. 27).

Tepat pada pagi hari tanggal 14 Februari 1942 pasukan Jepang dapat memukul mundur Sekutu, namun pada sore harinya kala bala bantuan Sekutu tiba, pasukan Jepang mulai terdesak hingga setengah dari pasukan Nippon ini tewas dan sisanya melarikan diri ke rawa-rawa (Goralski & Freeburg, 2021, p. 92). Enam hari kemudian *Dai Nippon Teikoku* sepenuhnya telah menguasai ladang minyak Palembang, walau sebagian sudah hancur (Abdullah *et al.*, 1984, p. 109; Zwitzer, 1992). Dari serangan ini tentu sudah dipastikan Jepang berhasil merebut sektor perekonomian terbesar di Palembang.



Gambar 4. Peta wilayah kilang minyak Sungai Gerong (NKPM) dan kilang minyak Plaju (BPM)
Sumber: Nortier, 1985

Manifestasi Ekonomi Perang Jepang di Palembang

Manifestasi dalam konteks tulisan ini adalah praktik, implementasi atau perwujudan dari ekonomi perang yang dijalankan militer Jepang di Palembang. Ekonomi perang yang dijalankan oleh Jepang dibedakan berdasarkan bentuk dan aspek. Pada bagian “bentuk ekonomi perang”, penulis merujuk pendapat menurut Billon dan “aspek ekonomi perang” akan mengadaptasi dari pandangan Hara (tabel 1).

Tabel 1. Bentuk Ekonomi Perang Jepang di Palembang

No.	Bentuk Ekonomi Perang	Substansi
1.	Ekonomi perang gerilya	- Pembentukan pemerintahan - Kampanye gerakan 3A
2.	Ekonomi perang komersial	- Pengelolaan sumber daya

1. Ekonomi Perang Gerilya

a. Pembentukan pemerintahan

Invasi bangsa Eropa di sebagian wilayah dunia pada abad ke-15 hingga abad ke-20 lebih dari kepentingan akan kekayaan (ekonomi) dan paham (keyakinan). Hal pertama setelah

penaklukan wilayah jajahan bangsa Eropa di sebagian wilayah tersebut adalah pembentukan pemerintahan baru agar peradaban dan misi yang disadari awal direncanakan terus terjal. Sedikit contoh tersebut merupakan bagian dari perang gerilya yaitu membuat sistem pemerintahan sendiri. Bentuk ekonomi perang tersebut juga dilakukan oleh militer Jepang di Palembang pada tahun 1942 hingga 1945. Berhasilnya Jepang memukul mundur Sekutu dari kota Palembang pada akhir bulan Februari 1942 yang sebelumnya langgeng dijalankan oleh pemerintahan Hindia Belanda.

Wilayah jajahan Belanda di Indonesia telah berakhir setelah penyerahan kekuasaan kepada militer Jepang pada Perjanjian Kalijati pada tanggal 8 Maret 1942. Isi dari perjanjian tersebut adalah Pemerintah Hindia Belanda menyerahkan Indonesia tanpa syarat kepada Jepang (Rommelink, 2021, p. 306). Perjanjian Kalijati menjadikan Jepang semakin kuat dan berkuasa di Palembang sehingga beberapa sektor harus dikuasai penuh oleh Jepang, terutama pada sektor ekonomi. Jepang menerapkan sebuah pola khusus dalam membagi wilayah kekuasaannya di Indonesia, pola ini membuat wilayah Indonesia secara umum dibedakan atas tiga wilayah yakni:

1. Jawa dan Madura dikuasai oleh Angkatan Darat (Rikigun) Jepang ke enam belas yang berkedudukan di Batavia (Jakarta) (Mita, 2019).
2. Sumatera dikuasai oleh Angkatan Darat Jepang ke dua puluh lima yang berkedudukan di Bukittinggi (Azizah *et al.*, 2021).
3. Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Barat berada di bawah komando Angkatan Laut (Kaigun) Kedua Jepang yang berpusat di Makassar (Abdullah *et al.*, 1991, p. 154).

Pemerintah militer Jepang langsung menerapkan beberapa kebijakan diantaranya adalah dengan segera membentuk pemerintahan sipil berbasis militer di beberapa wilayah di Indonesia khususnya di kota Palembang yang pemerintahannya dikenal dengan istilah Palembang *Shi*. Palembang secara resmi ditetapkan sebagai Palembang *Shi* pada tanggal 23 Maret 1942 bersamaan dengan Pelantikan *Shi-co* yang pertama yakni *Syucia* dan Sekretaris *Shi-co* Ir. Ibrahim Zahir (Hanafiah *et al.*, 2001:36). Hal ini berdasarkan pada keputusan tentara Angkatan Darat ke 25 yang berkedudukan di Bukittinggi yang mengeluarkan keputusan tentang membagi wilayah Sumatra menjadi sepuluh keresidenan yang disebut dengan istilah *Syu*, adapun kesepuluh *syu* tersebut yakni Aceh, Sumatera Timur, Tapanuli, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Palembang, Lampung, dan Bangka Belitung (Zed, 2005, p. 18).

Walaupun Palembang *Shi* masuk dalam sepuluh *syu*, tidak semua titik kota Palembang *Shi* masuk dalam wilayah administrasi Jepang. Artinya, terdapat suatu titik vital diluar administrasi Jepang di Indonesia, yaitu wilayah pengilangan minyak di Sungai Gerong dan Plaju. Kedua lokasi tersebut masuk ke dalam wilayah *Asano Butai* dan berada dalam pengawasan langsung pemerintahan militer Jepang di Singapura (Mita, 2019). Percaturan ekonomi perang Jepang di Palembang ini tidak sedikit merenggut nyawa maupun biaya yang digelontorkan selama perang demi merebut kilang minyak Sungai Gerong dan Plaju.

Pandangan Billon mengenai ekonomi perang gerilya ini bertujuan untuk mendapat dukungan dari penduduk lokal atas aksinya. Jepang setidaknya digadang-gadang sebagai “saudara tua” atau “sang penyelamat” bagi masyarakat lokal Palembang. Dengan begitu, setelah menguasai politik lokal maka penyusupan ideologi Jepang kepada masyarakat lokal agar tidak ada pemberontakan sebagai manifestasi ekonomi perang gerilya.

b. Kampanye Gerakan 3A

Memasuki April 1942 dibentuk Gerakan Tiga A yang bermakna Nippon Pemimpin Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Cahaya Asia di bawah pimpinan seorang ahli propaganda Jepang bernama Hitoshi Shimizu. Kegagalan konsep Gerakan Tiga A yang dibubarkan pada 20 November 1942 tidak lain akibat dari kurangnya pemerintahan Jepang menghayati perilaku sosial dan cita-cita politik rakyat yang telah bergerak lama menuju kemerdekaan. Ahli propaganda dari Jepang yang merencanakan Gerakan Tiga A ini yakni Shimizu telah berbuat kesalahan mendasar dalam cara memilih pendamping pribumi yang kurang populer dalam hal pergerakan nasional yakni Sukardjo Wirjopranoto dan H. Sjamsu. Padahal popularitas nama Ir. Soekarno dan Hatta jauh lebih populer dan berpengalaman (Said, 1992, p. 48).

Sebetulnya Jepang ingin terus menanamkan kesadaran dalam pikiran rakyat Palembang dalam tiga slogan Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Tetapi sulit rasanya Jepang membujuk rakyat Palembang yang pikirannya sudah sangat dikecewakan oleh tindakan-tindakan mereka yang kejam dan sadis di saat-saat awal pendudukan. Akibat dari kegagalan "mengambil hati" penduduk, Jepang agaknya juga dibuat frustrasi. Tindakan-tindakan penangkapan dan penyiksaan tak terbatas kepada penduduk biasa atau kalangan umum yang dicurigai, hingga penyiksaan terus meningkat kepada para pemimpin perjuangan kemerdekaan yang diketahui Jepang sebagai sahabat-sahabat Soekarno.

2. Ekonomi Perang Komersial

Dai Nippon Teikoku terbukti sejak awal menomorsatukan sumber daya ekonomi Palembang daripada mengakomodasikan kepentingan politik lokal. Sesuai dengan tujuan awal yakni untuk mengeksploitasi minyak di Palembang, maka tugas selanjutnya ialah merestorasi fasilitas dan instalasi minyak yang sempat dihancurkan oleh Belanda (Hanafiah *et al.*, 2001, p. 27). Walaupun sebenarnya Jepang tidak memiliki keahlian bahkan pengalaman sekalipun dalam industri perminyakan namun *Tenno Heika* menganggap minyak bumi adalah pasokan penting untuk untuk mesin perangnya (Abubakar *et al.*, 2020, p. 111). Masalah awal dari tugas ini adalah ketiadaan teknisi dari pihak Jepang yang cakap dalam industri minyak sehingga sulit menjalankan kembali kilang minyak tersebut. Maka usaha Jepang merekrut beberapa pribumi untuk dipekerjakan kembali seperti J. M. Pattiasina, Yakob, Pane (Plaju, 1999, p. 6).

Pada bulan April 1942, pemerintah dari negeri Jepang mengirim 4.600 teknisi ke ladang minyak Hindia Belanda (termasuk di Plaju dan Sungai Gerong) untuk memperbaiki kerusakan akibat taktik bumihangus Belanda (Pham, 2019, 25). Jepang mengumumkan perekrutan pekerja melalui siaran radio bahwa para personel kontruksi artileri dan bengkel untuk KNIL serta yang pernah bekerja di kilang minyak, diwajibkan untuk bekerja kembali. Semula, sebagian besar tenaga kerja atau pegawai menganggap Jepang adalah bangsa pembebas dengan itu mereka

bersedia bekerja dengan sukarela, namun seiring waktu konotasi pegawai menjadi kerja paksa untuk merehabilitasi kilang minyak yang rusak (Bartlett *et al.*, 1972, p. 55) Dalam usaha merestorasi kilang minyak ini Jepang menghabiskan setengah tahun untuk dapat digunakan kembali (Tanjung, 2015).

Keterampilan Jepang akan mengolah kilang minyak tidak sebaik Belanda. Terbukti selain mengandalkan pekerja lokal, Jepang hampir tak mampu memelihara mesin–mesin modern peninggalan Belanda tersebut, bahkan dampaknya ialah kurangnya investasi dan produksi minyak yang dihasilkan pun turun drastis (Vries, 2018). Data dari hasil produksi minyak BPM di Plaju dan Sungai Gerong pada masa pendudukan Jepang bisa dikatakan sangat sulit dicari. Pun terdapat secara keseluruhan hasil produksi minyak Hindia Belanda (Tabel 5).

Pada tahun 1942 instalasi minyak Plaju dapat memberi sekitar 1.227.830 metrik ton atau bila konversikan menjadi 9.000.000 barel kepada pemerintahan militer Jepang (Zed, 2003, p. 245). Rujukan antara Mestika Zed dengan Alex Hunter terhadap hasil produksi minyak mentah Hindia Belanda secara keseluruhan pada tahun 1942 berbeda hingga hampir tiga kali lipat. Zed menyatakan tahun 1942 hasil produksi minyak mentah sebanyak 11.200.000 barel atau 1.527.967 metrik ton. Hal ini berarti instalasi minyak Plaju menurut Zed menyumbangkan 82% dari keseluruhan.

Tabel 2. Jumlah Hasil Produksi Minyak Mentah Hindia Belanda pada Masa Pendudukan Jepang (dalam 000 metrik ton)

Asal pekerja	Jumlah
Luar Negeri (pemerintah negeri Jepang)	4.600
Batavia	300
Lokal (Palembang)	150
Total	5.050

Sumber: Hunter, 1966

Ekspor minyak dilakukan secara konsisten oleh pemerintah militer Jepang untuk memperkuat basis perang dan permintaan domestik lokal. Melirik intensifikasi produksi minyak Hindia Belanda dengan ekspor ke Jepang ini tidak selamanya mulus (tabel 3).

Tabel 3. Intensifikasi Ekspor Minyak Mentah Hindia Belanda ke negeri Jepang (dalam 000 metrik ton)

Tahun	Kuantitas	Jumlah Ekspor
April 1942 – Maret 1943	4.000	1.600

April 1943 – Maret 1944	7.900	2.370
April 1944 – Maret 1945	5.500	Nihil

Sumber: Pham, 2019, p. 26

Jepang juga membuka lahan minyak yang baru yang berbagai peralatan dan perlengkapan modern-nya didatangkan dari negari Jepang. Tahun 1943 merupakan produksi minyak terbanyak bagi Jepang selama pendudukannya di Hindia Belanda. Selama tahun ini Jepang mengimpor minyak produksi BPM sebanyak 2.791.268 metrik ton atau sekitar 20.460.000 barel (Zed, 2003, p. 245).

Tabel 4. Rencana Jepang dan Hasil Produksi Minyak Mentah Hindia Belanda

Tahun	Konsumsi Minyak Jepang yang Direncanakan	Hasil Produksi	Rencana Ekspor ke Jepang	Ekspor yang diterima Jepang	Konsumsi domestik
1942	35.900.000	25.900.000	1.900.000	10.500.000	15.400.000
1943	34.600.000	49.600.000	12.600.000	14.500.000	35.100.000
1944	35.900.000	36.900.000	28.500.000	5.000.000	32.000.000
1945	nihil	6,5	nihil	nihil	6.500.000

Sumber: Huff, 2020, p. 151

Rencana konsumsi minyak Jepang ini sudah termasuk untuk kebutuhan militer dan sipil. Perencanaan strategi estimasi dan rencana konsumsi minyak Hindia Belanda ini diatur oleh *Cabinet Planning Board* (Huff, 2020, p. 151). Pihak Jepang sendiri tidak selalu mengalami kelancaran dalam ekspornya keluar Hindia Belanda. Tidak semua kapal-kapal pengangkut minyak Jepang berhasil sampai ke negeri asalnya, karena adanya serangan pesawat tempur Sekutu. Hal ini bukan hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan minyak dalam negeri tetapi pada keterbatasan alat pengangkut (Zed, 2003, p. 246).

Kilang minyak Plaju hanya sebagai sapi perah bagi pemerintah militer Jepang dan berbeda bila dibandingkan dengan masa pendudukan Belanda. Setidaknya pada tahun 1930-an BPM berperan terhadap masyarakat lokal dengan membangun 41 sekolah yang tersebar di Palembang, penerimaan pemuda (dari dalam dan luar Palembang) untuk dipekerjakan, penyediaan air bersih, dan bahkan dapat dikatakan bahwa Palembang adalah simbol modernitas dan kemakmuran (Tanjung, 2019, pp. 56-59). Sedangkan pada masa pendudukan Jepang, para pemuda pribumi dijadikan sebagai buruh melalui pendidikan teknik minyak (*Minaraiko, Sekiyo Ko Yoseijo, Sekiyo Kogiyo Gakko* da *Minaraiko Sokseibu*) (Plaju, 1999, pp. 100-101). Setidaknya sejak tahun 1942 hingga 1945 berjumlah 1.200 pemuda yang dididik oleh

pemerintahan militer Jepang (Vries, 2021). Perbedaan ini sejatinya telah dijelaskan pada Pendahuluan bahwa untuk Jepang berkepentingan untuk perang Asia Timur Raya bukan untuk kesejahteraan masyarakat lokal. Jepang terus menyokong daya perangnya bukan hanya dari minyak saja. Keperluan dan permintaan karet bagi pemerintahan militer Jepang terus meningkat.

Tabel 5. Perkebunan daerah Palembang yang dikontrol Jepang (dalam hektar)

No.	Jenis Tanaman	Luas Perkebunan
1	Karet	146.047
2	Teh	54.634
3	Kina	10.449

Sumber: Zed, 2003, p. 247

Hasil perkebunan di daerah yang khusus di daerah Palembang secara angka sulit ditemukan. Namun hasil perkebunan masa pendudukan Jepang pernah dibukukan secara nasional (tabel 6). Hasil perkebunan ini didominasi di daerah Jawa dan sedikit sumbangan dari Palembang. Perkebunan ini dimasukkan dalam *cash crops* atau perkebunan komersial. Persis sama dengan komoditi sumber daya mineral minyak, Jepang dinilai kurang mampu mengendalikan basis ekonomi Palembang untuk perangnya. Perkebunan komersial yang diutamakan oleh Jepang untuk kebutuhan perangnya adalah tebu, karet, teh, kopi, tembakau, kopra dan kelapa sawit. Tanaman karet adalah komoditi utama diluar Jawa (Huff, 2020, p. 154). Hal ini tentu terbukti dalam tabel 6 bahwa Palembang memiliki lahan tanaman karet lebih besar daripada tanaman lain.

Tabel 6. Produksi Perkebunan Komersial Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang

Tahun	Kuantitas (dalam 000 ton)
1942	67,3
1943	49,6
1944	35,2
1945	21,3
Total	173,4

Sumber: Huff, 2020, p. 154

Pemerintahan militer Jepang mengubah tanah perkebunan karet dan kopi sebagai lahan pertanian. Namun gejala lain yang bagi keberlangsungan hidup masyarakat adalah terdapat aturan untuk di bidang perkebunan ini. Masyarakat lokal diharuskan menanam padi yang kemudian sebagian hasil panennya diserahkan kepada Jepang tanpa ganti rugi. Bahkan terdapat

hasil kebun yang tidak menunjang peperangan pun mengalami kemunduran seperti perkebunan kopi dan karet, sehingga barang komoditi tidak memiliki harga dipasaran (Abdullah *et al.*, 1984, p. 118). Ketidakmampuan untuk mengangkut bahan mentah dari negara-negara yang ditaklukkan adalah alasan utama runtuhnya ekonomi perang Jepang (Bollard, 2020, p. 233).

Kesimpulan

A.J.P. Taylor (sejarawan Inggris abad ke-19-an hingga 20-an) pernah mengatakan “*No matter what political reasons are given for war, the underlying reason is always economic*”. Ekonomi perang menurut Goodhand sendiri adalah strategi dan proses dimana negara mengkonsolidasikan atau memperkuat posisi mereka di dalam negeri dalam sistem negara internasional di luar batas-batas nasional. Bentuk ekonomi perang Jepang di Palembang adalah ekonomi perang gerilya dan komersial. Pembiasaan ini sudah tertanam hingga Kaisar *Dai Nippon Teikoku* berambisi menjadi super ekonomi Asia. Selama hampir 3,5 tahun terhitung sejak Februari 1942 hingga Agustus 1945, kekuasaan Jepang ini di Palembang ini memengaruhi sektor ekonomi. Tujuan awal Jepang bukanlah untuk memerhatikan politik masyarakat lokal, tetapi menguasai sebanyak-banyaknya sumber daya di Palembang, seperti minyak dan perkebunan.

Daftar Rujukan

- Abdullah, M., Ahmad, N., Soetjipto, F. A., & Safwan, M. (1984). Kota Palembang sebagai Kota Dagang dan Industri. *Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah Dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi Sejarah Nasional*.
- Abdullah, M., Bandiman, Djumiran, Ma'moen, W., Harifin, P., & Alimansyur. (1991). *Sejarah Daerah Sumatera Selatan* (E. Ramlan & N. Indones (Eds.)).
- Abubakar, A., Krisdiana, R., Sukarya, U., Santun, D. I. M., Adiyanto, J., Maliati, R., Wibawa, M. A., & Akbar, A. (2020). *Oedjan Mas Di Bumi Sriwijaya: Bank Indonesia Dan Heritage Di Sumatera Selatan*. Bank Indonesia Institue.
- Azizah, I., Syafitri, R., Supriyanto, & Syarifuddin. (2021). Struktur Pemerintahan Palembang Syu Pada Masa Pendudukan Jepang Tahun 1942-1945. *Fajar Historia*, 5(2), 157–170. <https://doi.org/10.29408/fhs.v5i2.4069>
- Bartlett, A. G., Barton, R. J., Bartlett, J. C., Junior, G. A. F., & Hays, C. F. (1972). *Pertamina: Indonesian National Oil*. American Limited.
- Billon, P. Le, Macrae, J., Leader, N., & East, R. (2000). The Political Economy of War: What Relief Agencies Need to Know. In *Humanitarian Practice Network* (Issue July).
- Bollard, A. (2020). *Economists at War: How a Handful of Economists Helped Win and Lose the World Wars*. Oxford University Press.
- Division, U. S. W. D. M. I. (1945). *Japanese Parachute Troops* (Special Se, Issue 32). United States Government Printing Office.
- Goodhand, J. (2004). From War Economy to Peace Economy? Reconstruction and State Building in Afghanistan. *Journal of International Affairs*, 58(1), 155–174.
- Goodhand, J. (2003). From War Economy To Peace Economy. *State Reconstruction and International Engagement in Afghanistan*, 1–19.

https://doi.org/10.2458/azu_acku_pamphlet_hc417_g66_2003

- Goralski, R., & Freeburg, R. W. (2021). *Oil & War: How the deadly struggle for fuel in WWII meant victory or defeat*. Marine Corps University Press.
- Hanafiah, D. (Ed.). (1998). *Sejarah Perkembangan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang*. Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang.
- Hanafiah, D., Mansyur, M. A., Halim, A., Widjaja, H., Karyana, A., & Notodiradjo, H. (2001). *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Di Kota Palembang*. Pemerintah Kota Palembang.
- Hara, A. (1998). Japan : Guns Before Rice. In M. Harrison (Ed.), *The economics of World War II: Six great powers in international comparison* (pp. 224–267). Cambridge University Press.
- Herlina, N. (2020). *Metode Sejarah edisi revisi*. Satya Historika.
- Heurn, J. N. C. Van. (1945). *Uuur Der Beproeving Onze Marine In Den Strijd Tegen Japan*. Elsevier.
- Huff, G. (2020). World War II and Southeast Asia: Economy and Society under Japanese Occupation. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781316162934>
- Jong, D. (1969). *Het Koninkrijk* (11a second).
- Kartodirdjo, S. (1992). *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Gramedia Pustaka Utama.
- Lohnstein, M. (2021). The Netherlands East Indies Campaign 1941–42: Japan's Quest for Oil. In *Scottish Geographical Magazine*. <https://doi.org/10.1080/00369224208735202>
- Mita, A. (2019). Palembang Shi pada Masa Pemerintahan Militer Jepang Tahun. *Lembaran Sejarah*, 15(2). <https://doi.org/10.22146/lembaran-sejarah.59530>
- Nortier, J. J. (1985). De gevechten bij Palembang in februari 1942. *Militaire Spectator*.
- Pelzer, K. J. (1942). Japan's Drive against the Netherlands East Indies. *Far Eastern Survey. Institute of Pacific Relations Japan's*, 11(3), 37–40. <https://doi.org/10.2307/3022267>
- Peterson, J. H. (2014). *Building a Peace Economy?: Liberal Peacebuilding and the Development-Security Industry*. Manchester University Press.
- Pham, V. T. (2019). *Beyond Political Skin: Colonial to National Economies in Indonesia and Vietnam (1910s-1960s)*. Springer.
- Plaju, A. P. T. M. (1999). *Sejarah teknik minyak Plaju 1942–1945: Kepeloporan semangat juang 1945*. Penerbit Unsri.
- Poesponegoro, M. D., & Notosusanto, N. (1992). *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*. Balai Pustaka.
- Rommelink, W. (Ed.). (2018). *The Operations of the Navy in the Dutch East Indies and the Bay of Bengal*. Leiden University Press. <https://doi.org/10.24415/9789087282806>
- Rommelink, W. (2021). *The Invasion of the South: Army Air Force Operations, and the Invasion of Northern and Central Sumatra* (W. Rommelink (Ed.)). Leiden University Press.
- Said, A. H. (1992). *Bumi Sriwijaya Bersimbah Darah*. Yayasan Krama Yudha.

Andromeda Aderoben, Ira Septiansi, Syarifuddin
Ekonomi Perang Jepang di Palembang, 1942-1945

- Studdard, K. (2004). War Economies in a Regional Context: Challenges of Transformation. In *International Peace Academy*. <https://doi.org/10.5860/choice.42-1060>
- Sufyan, F. H. (2021). Kepanduan dan Politik: Gerakan Padvinders di Padang Panjang 1926 - 1934. *Patanjala*, 13(1), 51–70. <https://doi.org/10.30959/patanjala.v13i1.630>
- Tanjung, I. L. (2015). The Indonesianization of the Symbols of Modernity in Plaju (Palembang), 1930s–1960s. In F. Colombijn & J. Côté (Eds.), *Cars, Conduits, and Kampongs: The Modernization of the Indonesian City, 1920-1960* (pp. 300–322). Brill. <https://doi.org/10.1163/9789004280724>
- Tanjung, I. L. (2019). *Palembang dan Plaju: Modernitas dan Dekolonisasi Sumatera Selatan Abad ke-20*. Penerbit Ombak.
- Vries, B. de. (2018). The Battle for Oil in The Dutch East Indies: Pladjoe, The Pearl in The Crown of The Bataafsche Petroleum Maatschappij (Shell), in The Turmoil of The 1940s. *International Planning History Society Proceedings*, 18(1), 137–148. <https://doi.org/10.7480/iphs.2018.1.2676>
- Vries, B. de. (2021). Petroleumscape as Battleground: Pladjoe, Pearl in the Crown of the Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM/Shell) in the Dutch East Indies. In C. Hein (Ed.), *OIL SPACES: Exploring the Global Petroleumscape* (pp. 43–65). Routledge.
- Yass, M. A. (2004). *Metodologi Sejarah Historiografi*. Universitas Sriwijaya.
- Zed, M. (2003). *Kepialangan Politik dan Revolusi : Palembang 1900-1950*. LP3ES.
- Zed, M. (2005). *Giyugun: Cikal Bakal Tentara Nasional di Sumatra*. LP3ES.
- Zwitzer, H. L. (1992). *Nederlands oorlogsverklaring aan Japan*. 109–120.